

Tidak Diperjualbelikan Kembali

KONDISI POLITIK DALAM NEGERI
REPUBLIK ISLAM IRAN PADA MASA
AYATULLAH RUHULLAH KHOMEINI
TAHUN 1979 / 1989

SKRIPSI



Oleh :

Kusdiniatun

NIM : 9202105012

18 SEP 1997
320.90955
KUS
PT 197-3426-1/1997
KUS

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
SEPTEMBER 1997

MOTTO :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ (الرعد: ١١)

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Dan bila Allah hendak mendatangkan bahaya kepada suatu kaum tiadalah dapat ditolak (QS. Ar Ra'du : 11, dalam H. Zaenuddin Hamidy dan Fachruddin HS.,1969 : 348).

Skripsi ini kuperesembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu yang selalu kucintai dan hormati yang telah mengasuh, membimbing dan mendorongku dalam meraih cita-cita.
2. Calon suamiku tercinta.
3. Teman-temanku senasib seperjuangan.
4. Almamater yang kujunjung tinggi.



KONDISI POLITIK DALAM NEGERI REPUBLIK ISLAM IRAN
PADA MASA AYATULLAH RUHULLAH KHOMEINI TAHUN 1979-1989

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan Tim Penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan spesialisasi Program Pendidikan Sejarah Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Oleh :

Nama : KUSDINIATUN
Nomor Induk Mahasiswa : 9202105012
Angkatan Tahun : 1992
Daerah Asal : Yogyakarta
Tempat dan Tanggal lahir : Gunung Kidul, 28 Desember 1974
Jurusan/Program : Pendidikan IPS/Pendidikan Sejarah

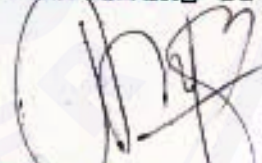
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Imam Muchtar, S.H.
NIP 130 810 936

Pembimbing II



Drs. Sutjitro
NIP 131 577 282

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji, dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai skripsi.

Pada hari : Selasa
Tanggal : 2 September 1997
Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,



Drs. H. CHOESNOEL HADI
NIP. 130 145 567

Sekretaris,



Drs. SUTJITRO
NIP. 131 577 287

Anggota :

1. Dra. SRI HANDAYANI

NIP. 131 472 786

(.....)

2. Drs. SOEKEMI

NIP. 130 341 207

(.....)

3. Drs. SUMARNO

NIP. 131 403 352

(.....)

Mengetahui

Dekan,



Drs. SOEKARDJO, BW
NIP. 130 287 101

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kondisi Politik Dalam Negeri Republik Islam Iran Pada Masa Ayatullah Khomeini Tahun 1979-1989" dengan baik.

Selama penulisan skripsi ini banyak bantuan yang penulis terima yang berupa bimbingan, pengarahan serta dorongan sebagai masukan yang sangat berharga, oleh karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
2. Ketua dan sekretaris Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Ketua Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Dosen pembimbing I dan II;
5. Semua Dosen Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
7. Ayahanda Muhammad Sarwin dan Ibunda Sulartini, yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun spirituil selama penulis menyelesaikan skripsi;
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal dan kebajikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang tidak sempurna pasti dalam skripsi ini ada kekurangan-kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis

kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sejarah pada khususnya.

Jember, 2 September 1997

Penulis



RINGKASAN

Kusdiniatun, Agustus 1997, Kondisi Politik Dalam Negeri Republik Islam Iran Pada Masa Ayatullah Khomeini Tahun 1979-1989

Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Pembimbing (I) Drs. Imam Muchtar, S.H. (II) Drs. Sutjitro

Kata Kunci : Kondisi Politik Iran

Peristiwa yang terjadi di dalam Negeri Iran setelah revolusi Islam merupakan fenomena yang tak kalah pentingnya dan untuk dikaji lebih mendalam. Republik Islam Iran sebagai produk revolusi menjadi sebuah model yang sama sekali baru di dunia politik modern. Itulah republik pertama yang memadukan politik modern seperti kepresidenan dan parlemen berstruktur wilayah faqih. Berkaitan dengan hal tersebut maka permasalahan yang dibahas adalah : bagaimanakah kondisi politik dalam negeri Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini tahun 1979-1989 ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kondisi politik dalam negeri Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini tahun 1979-1989. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai calon guru sejarah merupakan sarana dalam mengembangkan ilmu sekaligus memperdalam materi sejarah Asia Barat Daya khususnya Negara Iran. Bagi pembaca khususnya dapat menambah wawasan mengenai materi sejarah Asia Barat Daya khususnya Negara Iran.

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari 1997 sampai dengan bulan Agustus 1997, dengan studi literatur, sehingga tempat penelitiannya adalah perpustakaan. Dengan cara purposive sampling maka perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah perpustakaan pusat Universitas Jember, Laboratorium Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Untuk menemukan jawaban masalah diawali dengan mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumenter, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode filosofik dengan teknik logika induktif dan komparatif.

Berdasarkan metode sejarah (historik) maka hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi politik dalam negeri Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini tahun 1979-1989 adalah kekuasaan tertinggi di tangan para imam, sistem pemerintahan parlementer dan bentuk pemerintahan Republik Islam, terjadi konflik intern antar partai politik : kaum mullah dengan nasionalis, kaum mullah dengan suku kurdi (suni), kaum mullah dengan marxis, kaum mullah dengan kaum mullah. Dibentuknya pasukan pengawal



mullah dengan kaum mullah. Dibentuknya pasukan pengawal revolusi Islam Iran (Pasdaran) yang bertujuan memelihara perdamaian dan kemerdekaan negara.

Sedangkan saran-saran yang penulis ajukan adalah untuk mahasiswa Program Pendidikan Sejarah, sebagai calon guru sejarah, sebaiknya lebih mendalami materi sejarah sebagai persiapan terjun ke masyarakat, untuk para peneliti sebaiknya lebih banyak membaca hasil-hasil penelitian yang telah diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian yang lebih baik, bagi almamater hendaknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan lebih banyak menyediakan literatur sehingga penelitian di Universitas Jember terus berkembang dan bermutu sebagai wujud pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	11
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGAJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	5
1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan	8
1.3.1 Ruang lingkup Permasalahan	8
1.3.2 Rumusan Permasalahan	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kondisi Politik Dalam Negeri Republik Islam Iran pada Masa Ayatullah Khomaeni Tahun 1979-1989	10
2.2 Hipotesis	18
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pengertian Metode Penelitian	19
3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah	20
3.2.1 Heuristik	20
3.2.2 Kritik	21
3.2.3 Interpretasi	22
3.2.4 Historiografi	22
3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian	23
3.4 Metode Pengumpulan Data	24

3.5 Metode Analisa Data	25
3.5.1 Teknik Logika Induktif	26
3.5.2 Teknik Logika Komparatif	26
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Konsepsi Madzab Syi'ah Tentang Negara	28
4.1.1 Idiologi Politik	29
4.1.2 Ajaran-ajaran Syi'ah	32
4.2 Kondisi Politik Dalam Negeri Republik Islam Iran Pada Masa Ayatullah Khomaeni tahun 1979-1989.....	41
4.2.1 Konsepsi Ayatullah Khomaeni Tentang Negara	41
4.2.2 Sistem Pemerintahan	45
4.2.3 Konflik Intern Antar Partai Politik ...	52
4.2.4 Pembentukan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran (Pasdaran)	56
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran-saran	59
 KEPUSTAKAAN	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	63
2. Peta Republik Islam Iran	64
3. Struktur kekuasaan Republik Islam Iran	65
4. Surat Keterangan Studi Literatur	66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Kawasan Timur Tengah letaknya sangat strategis dalam percaturan politik Internasional. Konflik dan diplomasi selalu mewarnai kehidupan politik negara-negara Timur Tengah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Timur Tengah menjadi pusat perhatian dunia. Pertama, Timur Tengah mempunyai persediaan minyak yang paling besar, dimana energi minyak menjadi barang yang sangat penting dalam menentukan percaturan politik dan ekonomi internasional. Kedua, Timur Tengah yang kaya dari minyak menjadi negara mengimpor senjata dari negara-negara barat (Amerika, Inggris, Perancis) dan timur (Unisoviet). Ketiga, berkat sumber minyak negara-negara Timur Tengah mampu menyedot komoditi dari luar, sehingga Timur Tengah bernilai ekonomis disamping strategis. Keempat, konflik antar negara Timur Tengah terutama terutama Israel dan negara Arab menjadi dimensi internasional dan melibatkan campur tangan negara lain. Kelima, Timur Tengah karena letaknya yang menghubungkan benua Eropa, Afrika dan Asia, sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat internasional. Keenam, Timur Tengah terbukti dalam sejarah telah menjadi asal muasal peradapan manusia, bahkan semua agama wahyu diturunkan di kawasan Timur Tengah (Taylor, 1990: 5-6).

Kalau berbicara tentang kawasan Timur Tengah tentunya membicarakan negara-negara yang berada di wilayah tersebut. Mayoritas negara yang didiami oleh bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain dalam lingkungan geografisnya. Amin Rais mengungkapkan bahwa bangsa-bangsa yang pernah hadir di kawasan ini dengan sendirinya ikut mengukir sesuai dengan dinamika proses sejarah, disamping didiami oleh bangsa Arab sendiri, bangsa lainnya adalah Persia (Iran), Afganistan, Turki, serta bangsa Kurdi (Taylor, 1990: 6).

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka negara yang menjadi perhatian penulis yaitu negara Iran termasuk salah satu negara di kawasan Timur Tengah.

Iran secara spesifik mempunyai dimensi historis yang sangat panjang dan menjadi perbincangan sejarah dunia. Perubahan yang terjadi di Iran merupakan obyek pembicaraan hangat para pengamat politik internasional. Apalagi setelah terjadi revolusi Islam tahun 1978-1979. Revolusi Islam di Iran berbeda jauh dengan revolusi yang pernah terjadi di negara lain. Di Iran revolusi diciptakan oleh rakyat sebagai suatu kesatuan, sistem nilai yang berhasil mempersatukan rakyat secara keseluruhan sehingga mencapai situasi revolusioner adalah Islam yang telah berada di Iran hampir selama 1400 tahun (Siddiqui, dkk. 1984:9).

Proses persatuan rakyat yang didukung oleh kondisi Iran pada jaman pemerintahan Syah merupakan pemicu timbulnya reaksi terhadap kebobrokan Syah. Munculnya gerakan-gerakan penentangan yang sebagian besar dilakukan melalui universitas dan masjid oleh para ayatullah, hujjatul Islam dan para mullah dengan gigih membeberkan sistem yang diterapkan penguasa dan ketergantungannya pada Amerika Serikat, serta tindakan-tindakan teror yang telah dilakukan (Garaudy, 1993: 53).

Melihat alasan rakyat dalam menentang rezim Syah, maka seluruh kebijaksanaan Syah, baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang bersifat otoriter merupakan faktor penyebab utama pecahnya revolusi Iran. Proses de-Islamisasi yang diterapkan Syah terhadap ajaran Islam yang dipegang teguh oleh rakyat Iran juga turut menjadi faktor penentu bangkitnya perlawanan terhadap pemerintah Syah (M. Riza Sihbudi, 1989: 33).

Bagaikan sebuah hukum yang harus ditegakkan, revolusi Islam Iran memang sebuah tindakan yang relevan dan sangat dinantikan. Rezim Syah ketika itu memang sudah sangat

bobrok, sehingga tidak sesuai dengan hukum Tuhan (sunnatullah), kebatilan atau kebobrokan itu ditopang oleh angkatan bersenjata negara adidaya. Betapapun kuatnya akhirnya pasti hancur berhadapan dengan kebenaran (M. Amien Rais, 1991: 200).

Sulit untuk menentukan kapan sebenarnya revolusi Islam Iran dimulai. Namun yang jelas, pergolakan-pergolakan yang panjang dan pada akhirnya meruntuhkan kekuasaan Syah berawal dari terjadinya demonstrasi di Qum pada tanggal 9 Januari 1878. Sejak itu pihak oposisi melancarkan aksi-aksi yang semakin intensif. Pergolakan dan demonstrasi mewarnai kehidupan politik di Iran selama satu tahun lebih. Silih berganti kabinet yang dibentuk Syah tidak mampu meredakan situasi sehingga memaksa Syah meninggalkan negaranya (M. Riza Sihbudi, 1989: 34).

Kepergian Syah ke luar negeri semakin mempercepat berkobarnya api revolusi di Iran. Kembalinya Khomeini ke Iran (1 Februari 1979), pernyataan sikap netral angkatan bersenjata Iran (11 Februari 1979) dalam menghadapi konflik yang terjadi antara pengikut Imam Khomeini dan pendukung Syah. Hal tersebut merupakan rangkaian kejadian yang mempercepat runtuhnya kekuasaan Reza Pahlevi yang kemudian menjurus pada kemenangan Republik Islam dibawah Khomeini (M. Riza Sihbudi, 1989: 34).

Kehadiran sosok Khomeini di Iran, benar-benar merupakan simbol kekuatan yang tak tertahankan. Begitu tiba di Iran, ia mengumumkan bahwa pemerintahan Dr. Syahbur Bakhtiar tidak sah, dan mengangkat Bazar Khan sebagai Perdana Menteri. Khomeini memproklamirkan lahirnya negara Republik Islam Iran (Musa Al-Musawi, 1988: 37).

Revolusi Islam Iran tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik. Betapa tidak, sebuah rezim yang memiliki angkatan perang yang terkuat di kawasan Teluk Persi dan didukung penuh oleh Amerika Serikat, akhirnya berhasil

diporak-porandakan oleh kekuatan rakyat yang dimotori oleh para tokoh agama dengan Imam Khomeini sebagai pimpinan utamanya (M. Riza Sihbudi, 1989 : 5).

Disamping itu, peristiwa yang terjadi didalam negeri Iran setelah revolusi Islam juga merupakan fenomena yang tak kalah pentingnya dan untuk dikaji lebih mendalam. Lebih-lebih perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi dapat dijadikan bahan perbandingan bagi negara-negara lain di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Republik Islam Iran sebagai produk revolusi menjadi sebuah model yang sama sekali baru di dunia politik modern. Itulah Republik pertama yang memadukan lembaga politik modern seperti kepresidenan dan parlemen berstruktur wilayah faqih (pemerintahan para fuqaha). Hal kedua, kemampuannya untuk bertahan kendati menghadapi tantangan dan rintangan yang berat. Ketiga, tampaknya bisa ditarik sebagai pelajaran berharga adalah proses suksesi kepemimpinan yang berjalan lancar (M. Riza Sihbudi, 1989: 5-6).

Dari uraian diatas, penulis menyadari bahwa revolusi Islam Iran yang melahirkan negara Republik Islam Iran tidak lepas dari peranan Imam Khomeini sebagai tokoh sentralnya. Dan penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan: 1) belum pernah diteliti oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, khususnya program Sejarah. 2) permasalahan masih dalam jangkauan peneliti. 3) literatur yang diperlukan sebagai sumber data tidak banyak kesulitan untuk didapatkan. 4) kesediaan dosen membimbing. dan 5) cukup penting untuk diteliti sehingga dapat melengkapi koleksi sejarah khususnya yang berhubungan dengan masalah sejarah Asia Barat Daya. Dari alasan diatas, maka penulis memberanikan diri memilih judul penelitian ini dalam sebuah judul: "KONDISI POLITIK DALAM NEGERI REPUBLIK ISLAM IRAN PADA MASA AYATULLAH KHOMAINI TAHUN 1979-1989".

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalah pahaman antara pembaca dan penulis dalam menafsirkan tulisan ini, maka penulis perlu memberikan batasan-batasan atau pengertian dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul diatas. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

a. Kondisi

Kata kondisi adalah sama pengertiannya dengan keadaan yaitu situasi yang sedang berlangsung (Depdikbud, 1990: 4-5). Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud kondisi pada judul diatas adalah situasi politik yang berlaku (diterapkan Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini tahun 1979-1989).

b. Politik

Politik adalah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara dan terhadap negara lain (Tim Penyusun, 1990 : 694). Selanjutnya Miriam Budiharjo mengatakan bahwa politik dalam arti power (kekuasaan) adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Politik dalam arti policy (kebijaksanaan) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (1988: 10-12).

Dari uraian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan politik adalah kemampuan Imam Khoimeini dalam menghimpun kekuatan sekaligus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta kebijaksanaan yang diputuskan mengenai pemerintahan negara.

c. Dalam Negeri

Kata dalam artinya adalah yang tidak tampak dari luar, sedangkan kata negeri berarti negara atau pemerintah. (Poerwadarminta, 1976 : 223 dan 673). Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dalam negeri adalah lingkungan negeri atau pemerintahan yang tidak tampak dari luar.

d. Republik Islam Iran

Arti kata republik adalah bentuk pemerintah yang berkedaulatan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden (Tim Penyusun, 1990: 744). Sedangkan Republik Islam adalah suatu bentuk pemerintah yang tunduk pada hukum Islam yang berasal dari Tuhan yang secara jelas memadukan Agama dan politik, dimana kekuasaan sepenuhnya berada ditangan para fuqaha (M. Riza Sihbudi, 1989: 61).

Negara Iran adalah sebuah negara yang bentuk pemerintahannya berdasarkan ajaran Islam Syi'ah imamiyah, terletak di Asia Barat Daya. Di sebelah utara berbatasan dengan Rusia dan laut Kaspia; di sebelah timur berbatasan dengan Afganistan dan Pakistan; sebelah barat berbatasan dengan Turki dan Irak serta di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman (Hasan Syadily, 1982 : 1480).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Republik Islam Iran adalah suatu bentuk pemerintahan yang memadukan lembaga agama dan lembaga politik berdasarkan hukum Islam (Syi'ah) dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang Imam yaitu Ayatullah Khomeini.

e. Ayatullah Khomeini

Khomeini yang nama lengkapnya Ruhullah Al-Musavivh Al Khomeini lahir di kota Khomein Tengah tahun 1902 pada usia 19 tahun belajar Agama Islam di Irak kemudian mendirikan pusat riset dan kebudayaan Islam di kota suci Qum. Nama



Khomeini selalu dihubungkan dengan dua hal yaitu Syi'ah dan revolusi Iran. Syi'ah adalah salah satu mazhab dalam Islam yang mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai Imam pertama mereka. Ayatullah merupakan gelar tertinggi dalam hirarki kepemimpinan pada mazhab Syi'ah di Iran. Revolusi Iran yang dikobarkan Khomeini mempunyai ciri-ciri populis dan religius. Keistimewaan dari revolusi ini adalah seorang maharaja diraja yang memiliki tentara terkuat nomor lima di dunia berhasil digulingkan oleh rakyat yang dipimpin oleh seorang ulama tua yang mungkin sepanjang hidupnya belum pernah memegang senjata (M. Riza Sihbudi, 1989 : 5).

Dalam UUD Republik Islam Iran, ditetapkan Khomeini sebagai Marja'i Taqlid Agung (ahli tentang agama dan hukum Islam) merangkap sebagai ketua dewan revolusi. Sebagai Marja'i Taqlid Agung, Khomeini berada paling atas dalam struktur pemerintahan Iran. Ia berhak memberhentikan presiden dan pejabat tinggi lainnya. Semua ucapannya dituruti tanpa reserve oleh mayoritas rakyat Iran.

f. Tahun 1979-1989

Tahun 1979 tepatnya tanggal 11 Februari merupakan hari diplokanirkannya negara Republik Islam Iran yang merupakan awal pembahasan penelitian ini. Sedangkan tahun 1989 merupakan batas akhir dari penelitian ini yaitu ditandai dengan meninggalnya pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran dan imam Republik Islam Iran, Ayatullah Al Uzma Ruhullah Al Musayi Al Khomeini tanggal 4 Juni 1989.

Dari penegasan pengertian judul tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah ingin memaparkan tentang situasi politik dalam negeri pada masa Ayatullah Khomeini menjadi Marja'i Taqlid Agung di Republik Islam Iran tahun 1979-1989.

1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan

1.3.1 Ruang Lingkup Permasalahan

Untuk mengarahkan penelitian ini sehingga tidak keluar dari pokok-pokok yang dibahas, maka penulis menganggap perlu untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini. Ruang lingkup temporal (waktu) sebagaimana judul penelitian tersebut di atas, diawali tahun 1979 yaitu tepatnya 11 Februari merupakan hari diproklamirkannya negara Republik Islam Iran dan akhiri tahun 1989 tepatnya tanggal 4 Juni hari meninggalnya Ayatullah Khomeini. Adapun ruang lingkup spasial (tempat) adalah negara Iran yang berbatasan di utara dengan Uni Soviet dan Laut Kaspia, di sebelah timur berbatasan dengan Pakistan dan Afganistan, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman, disebelah barat berbatasan dengan Iraq dan Turki (Anonim, 1988 : 21). Ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah mengenai kondisi politik dalam negeri negara Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini.

1.3.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan adalah :

bagaimanakah kondisi politik dalam negeri Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini tahun 1979-1989 ?

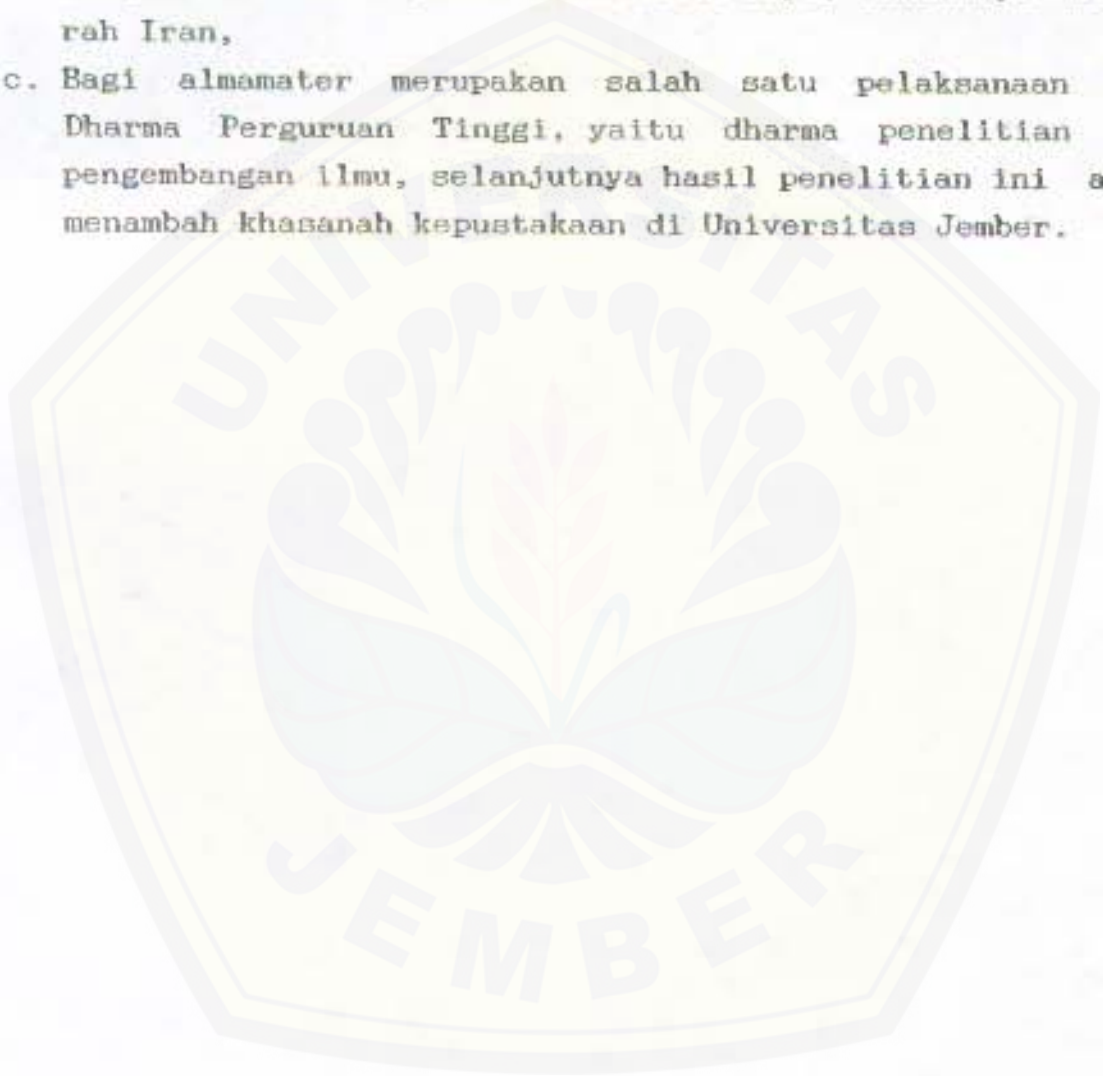
1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemilihan permasalahan, ruang lingkup dan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan ingin mengetahui secara jelas dan mendalam mengenai kondisi politik dalam negeri Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini tahun 1979-1989.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, merupakan sarana dalam mengembangkan ilmu sekaligus memperdalam materi Sejarah Asia Barat Daya khususnya negara Iran,
- b. Bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah wawasan mengenai materi sejarah Asia Barat Daya, khususnya Sejarah Iran,
- c. Bagi almamater merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma penelitian dan pengembangan ilmu, selanjutnya hasil penelitian ini akan menambah khasanah kepustakaan di Universitas Jember.



BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kondisi Politik Dalam Negeri Republik Islam Iran pada Masa Ayatullah Khomeini Tahun 1979-1989

Mazhab adalah haluan dan ajaran mengenai hukum Islam yang menjadi anutan umat Islam (Poerwadarminta, 1976 : 640). Syi'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya pengikut/partai/golongan. Yang dimaksud Syi'ah di sini adalah suatu golongan dalam Islam yang beranggapan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berhak sebagai khalifah pengganti nabi (Sahilun A. Nasir, 1982 : 15-16).

Sesudah Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, Hasan Bin Ali diangkat sebagai khalifah (Thabathaba'i, 1993 : 57). Khalifah Hasan tidak bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik karena adanya pengkhianatan dari pengikutnya yang membantu Muawiyah yang terus mengintai dan menghancurkan Ali dan permusuhan yang dikobarkan golongan Khawarij (Abu Bakar Aceh, 1980 : 65).

Posisi Syi'ah semakin goyah dengan terjadinya perselisihan dan perpecahan yang sengaja ditanamkan oleh golongan Saba'iyah. Kurang wibawanya khalifah Hasan saat itu menjadi faktor yang mempersulit posisi Syi'ah. Usahanya memerangi golongan Saba'iyah sungguh sangat mengecewakan sehingga sebagian pengikutnya bergabung dengan golongan Saba'iyah, Khawarij, dan Muawiyah. Oleh karena itulah khalifah memilih jalan damai dengan pihak Mu'awiyah (Muslih Fathoni, 1994 :24).

Akhirnya pada tahun 41 Hijriyah atau 661 Masehi, Mu'awiyah berhasil menguasai kekhalifahan dan sesudah itu dia pergi ke Irak. Dalam suatu pidato kepada rakyat di daerah itu Mu'awiyah sengaja mengkhianati perjanjian yang dibuatnya

bersama khalifah Hasan. Dalam pengumumannya itu dia mengisaratkan bahwa dia akan memisahkan urusan agama dengan politik dan tidak akan memberikan suatu jaminan berkaitan dengan kewajiban dan peraturan-peraturan keagamaan serta mengubah struktur lembaga masyarakat Islam menjadi kerajaan. Dengan pengumuman ini pula, Mu'awiyah memberitahukan kepada rakyatnya, watak hakiki pemerintahannya dan memperlihatkan sifat dan rencana absolutismenya lewat suatu bentuk struktur masyarakat yang akan diciptakannya yaitu kerajaan (Thabathaba'i, 1993 : 57-58).

Keinginan Muawiyah agar baiat kaum muslimin diberikan pada Yazid. Kebijaksanaan Muawiyah ini menyimpang dari tradisi bahwa khalifah selanjutnya harus dipilih berdasarkan sunnah nabi, tidak saja memaksa ummat untuk menyetujui Yazid, tetapi juga menegakkan suatu tata cara yang diciptakan untuk pertama kali dalam Islam (Thabathaba'i, 1993 : 22-23).

Imam Hussein didesak oleh penduduk kuffah yang mengatakan janji setianya kepada Imam Hussein yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa Padang Karbala, yaitu syahidnya Imam Hussein secara memilukan pada tanggal 10 Muharram 61 H (1 Oktober 680). Peristiwa tersebut oleh Syiah Kuffah dijadikan semangat baru dan berkeyakinan bahwa mati berperang karena membela kepentingan hal yang lebih baik adalah mati syahid (Muslih Fathoni, 1994 : 25).

Bagi kaum Syi'ah Persia, Hussein memiliki keistimewaan tersendiri. Hal ini disebabkan istri Hussein adalah seorang putri mantan raja Persia Yazdajird III. Karena itulah mereka memandang ahlul bait sebagai golongan yang berhak memerintah dan harus ditaati oleh manusia. Mereka memandang bahwa keimanan harus berada di tangan keturunan Imam Hussein dan harus melalui nash dari imam, baik yang dikenal maupun tersembunyi (Muslih Fathoni, 1994 : 26-28).

Dalam sejarah perkembangan golongan Syi'ah (mazhab Syi'ah) terpecah menjadi 25 aliran yang bersumber pada empat aliran besar, yaitu: 1) Al Kaesianiyah; terdiri atas Al Mukhtariyah, Al Hasyimiyah, Al Bayaniyah, Ar Rizamiyah, 2) Az Zaidiyah; terdiri atas Al Jurudiyah, As Sulaimaniyyah, As Solihiyah wal Baasyariyyah, 3) Al Imamiyah; terdiri atas Al Baqiriyah wal Ja'fariyah Al Waqifah, An Nawusiyah, Al Afthohiyah, Asy Syumaithiyah, Al Isma'iliyah Al Waqifah, Al Musawiyah wal Muffadliyah, dan Al Itena Asyariyah, 4) Al Ghaliyah; terdiri atas As Saba'iyah, Al Khathabiyah, Al Hayaliyah, Al Hisyamiyah, An Nu'maniyah, Al Yunusiyah, Al Nusyairiyah wal Ishaqiyah (Sahilun A. Nasir, 1982: 102-103).

Dalam Mazhab Syiah terdapat beberapa aliran sebagaimana yang disebutkan di atas, tetapi dalam penelitian ini penulis membicarakan Syiah Imamiyah aliran Itena Asyariyah (12 imam), karena aliran tersebut dianut oleh mayoritas penduduk Iran dan merupakan aliran terbesar dalam Mazhab Syiah (M. Riza Sihbudi, 1989 : 43).

Syiah Imamiyah aliran Itena Asyariyah berkeyakinan bahwa yang berhak menggantikan imam setelah nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Untuk lebih lengkapnya penulis akan menyebutkan nama-nama 12 imam sesuai dengan urutannya sebagai berikut:

1. Ali Bin Abi Thalib
2. Hasan Bin Ali
3. Husein Bin Ali
4. Ali Zainal Abidin Bin Husein
5. Muhammad Al Baqir Bin Zainal Abidin
6. Ja'far Ash shadiq (putra Al Baqir)
7. Musa Al Kazim (putra Ash Shadiq)
8. Ali Al Ridha (putra Kazim)
9. Muhammad Al Jawad (putra Al ridha)
10. Ali Al hadi (putra Al Jawad)
11. Hasan Al Askari (putra Al Hadi)

12. Muhammad Bin Hasan Al Mahdi (putra Al Askari)
(M. Riza Sihbudi, 1989 : 43).

Diantara ajaran-ajaran Syi'ah Imamiyah, aliran Itena Asyariyah terdapat ajaran-ajaran yang bersifat religius revolusioner dan anti kekuasaan yaitu imamah, Jihad, dan intidhar.

Imamah menurut pendapat Sam'ani yang dikutip oleh Abu Bakar Aceh menyatakan bahwa Syiah itu merupakan golongan kuat yang menumpahkan imam dan kepercayaannya kepada Ali dan keturunannya serta berkeyakinan bahwa manusia itu harus mempunyai imam atau menantikan seorang imam yang akan lahir di akhir zaman membawa bendera keadilan yang penuh intrik dunia ini (1980 : 99).

Masalah imamah oleh penganut Syi'ah sudah ditentukan oleh Allah melalui nabi. Sebagaimana halnya dengan penunjukan nabi, imam juga ditunjuk Allah. Bedanya adalah kalau nabi ditunjuk oleh Allah secara langsung, sedangkan imam ditunjuk oleh nabi atau imam sebelumnya. Oleh karena percaya dan taat pada imam merupakan salah satu kewajiban ummat. Hal ini sebagai manifestasi dari tidak terpisahnya agama dan politik dalam ajaran Syi'ah (M. Riza Sihbudi, 1989 : 42).

Jihad, berjuang untuk menegakkan ajaran Allah dan kesediaan berkorban demi agama (syahid) didasarkan pada keyakinan bahwa dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang beriman (M. Riza Sihbudi, 1989 : 49).

Bagi syi'ah, Imam Hussein merupakan simbol kepahlawanan kemanusiaan, kesempurnaan cita-cita, suluh dan penerang bagi agama, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, menghidupkan kepahlawanan Imam Husein serta mengabdikan jihadnya, sama dengan menghidupkan kebenaran, keadilan, kemerdekaan, pengorbanan diri (Abu Bakar Aceh, 1980 : 63). Dengan demikian konsep syahadah (bangkit dan bersaksi) memainkan peranan penting dalam sejarah Islam dan menjadi prinsip revolusioner Islam syiah (Ezzali, 1990 : 63-64).

Intidhar, adalah keyakinan kepada ajaran penantian imam yang ghaib. Keyakinan Intidhar berarti mempercayai kembalinya zaman keemasan dalam revolusi yang akan menghasilkan pemerintahan yang damai dan adil di masa depan (Ezzali, 1990 : 94-95).

Prinsip penantian imam yang ghaib (intidhar) bagi Syi'ah adalah suatu prinsip sosial kultural dan sifat naluriah manusia secara mendasar, kepercayaan kepada penyelamat yang dijanjikan di masa depan dan prinsip penantian, dengan sendirinya berorientasi ke depan (Ali Syari'ati, 1993 : 60). Dengan dimulainya prinsip Intidhar secara otomatis penunjukan imam menjadi terhenti (Donokue & Esposito, 1989 :558).

Menurut keyakinan kaum syi'ah, imam yang terakhir yaitu Imam Muhammad bin hasan Al Mahdi yang hilang (ghaib) sejak tahun 329 H dan akan muncul kembali pada akhir jaman untuk menyelamatkan umat Islam. Selanjutnya kaum syi'ah berpendapat bahwa selama masa kekosongan tersebut maka jabatan imam diserahkan kepada seorang tokoh yang mampu menguasai hukum Islam dan agama. Ketaatan kaum syiah terhadap wakil imam tersebut sama hukumnya dengan ketaatan kepada imam yang 12 yaitu wajib. Selain keyakinan masalah imamah, mazhab syi'ah juga mengajarkan ajaran Tagiyah yaitu suatu cara untuk sementara taat pada pemerintah yang berkuasa dan dianggap tidak adil, kemudian menghancurkan bila ada kesempatan. Disamping itu masalah kesediaan berkorban jihad di jalan Allah juga merupakan ajaran yang sangat penting dan saling berkaitan antara mazhab syiah dan revolusi Islam Iran (M. Riza Sihbudi, 1989 : 43-44).

Dengan munculnya Ayatullah Khomeini sebagai pencetus revolusi Islam Iran yang kemudian dikenal dengan sebutan Imam Khomeini (pengganti Imam yang ghaib), maka konsep dan gagasan Imam Khomeini tentang negara dan pemerintahannya akan mewarnai perkembangan politik negara Iran. Imam Khomeini menghendaki suatu bentuk negara Islam, kekuasaan sepe-

nuhnya ditangan para fuqaha (alim ulama) yang dikenal dengan wilayah faqih (pemerintahan fuqaha) yang merupakan kelanjutan doktrin Imamah karena melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan imam (Ahmad Mousseawi, 1986 : 129).

Gagasan Khomeini tentang wilayah faqih sudah dikemukakan secara konsisten sejak meletusnya revolusi Islam Iran. Isi gagasan tersebut adalah : 1) para alim ulama yang berhak menjadi penguasa dalam sebuah negara Islam, adalah laki-laki yang memiliki kecerdasan dan kepandaian yang luas dan mampu mengerahkan dan mengarahkan potensi masyarakat, 2) fungsi seorang fuqaha adalah sebagai pewaris nabi, karena itu mempunyai tugas dan kewajiban untuk memepergunakan angkatan bersenjata dan aparat politik, demi pelaksanaan hukum Tuhan, serta membentuk suatu sistem pemerintahan demi kemakmuran bangsa, 3) membentuk pemerintahan atau negara Islam, hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, khususnya para alim ulama dimanapun mereka berada, karena hal itu merupakan bagian utama dari aqidah imamiyah, 4) negara atau pemerintahan Islam diperlukan demi tegaknya hukum Islam, karena hukum apapun tidak melaksanakan tanpa adanya suatu kekuasaan eksekutif, 5) di dalam negara Islam, para wakil rakyat tidak berhak membuat undang-undang, karena undang-undang atau hukum Islam langsung diperoleh dari Tuhan, yaitu Al Qur'an dan hadist (M. Riza Sihbudi, 1989 : 53).

Revolusi Islam yang terjadi pada tahun 1979-1989 telah merubah sistim politik dan bentuk negara Iran dari monarki absolute menjadi Republik Islam. Bentuk republik Islam secara resmi disetujui mayoritas (98,2%) rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada 1 April 1979, sedangkan undang-undang dasar Republik Islam Iran disetujui secara mayoritas (99,5%) rakyat Iran melalui referendum 3 Desember 1979 (M. Riza Sihbudi, 1992 : 33).

Kekuasaan tertinggi dalam struktur politik Republik Islam Iran berada di tangan Imam sesuai dengan pasal 5 UUD

Republik Islam Iran yang menyebutkan : selama ketidakhadiran imam yang 12 (semoga mempercepat kedatangannya), dalam Republik Islam Iran, kepemimpinan urusan-urusan dan pimpinan umat merupakan tanggung jawab seorang faqih (ahli hukum Islam) yang adil dan taqwa, mengenal jaman, pemberani, giat dan berinisiatif yang dikenal dan diterima oleh mayoritas umat sebagai imam (pemimpin) mereka. Apabila faqih seperti itu tidak diterima secara mayoritas semacam itu, suatu dewan pimpinan yang terdiri dari para fuqaha yang mempunyai syarat-syarat tersebut di atas memegang tanggung jawab itu (Anonim, tth : 19).

Selanjutnya dalam pasal 107 sampai 110 mengesahkan Ayatullah Khomeini sebagai Wilayatul Faqih Marja'i Taqlid yang mempunyai kewenangan mengangkat para fuqaha, anggota dewan perwalian, mengangkat pejabat kehakiman tertinggi negara, mengangkat dan memberhentikan kepala staf gabungan dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam, membentuk dewan tertinggi pertahanan nasional, mengangkat komandan-komandan ketiga angkatan bersenjata asal usul dewan tertinggi pertahanan nasional, menyatakan perang dan damai, serta mengesahkan dan memperhentikan presiden (Anonim, tth : 61-64).

Setelah imam, kekuasaan tertinggi negara berada ditangan presiden. Dalam pasal 113 disebutkan bahwa presiden bertanggung jawab dalam penerapan UUD, pengaturan ketiga cabang kekuasaan negara, dan memimpin cabang eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab imam. Seorang presiden di Iran, berdasarkan pasal 114 dipilih untuk masa jabatan 4 tahun, dan dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Presiden hanya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi secara berurutan. Selanjutnya kondisi politik dalam negeri Republik Islam Iran diwarnai konflik antar partai politik yaitu : 1) konflik antar kaum Mullah dengan kelompok nasionalis, bersumber pada perbedaan konsepsi tentang peranan dan posisi kaum agamawan dalam

kehidupan politik. Kaum Mullah menghendaki peran aktif agamawan, sedangkan kelompok nasionalis menghendaki kaum agamawan sebagai penasihat dan pengawas saja, 2) Konflik antara kaum Mullah dengan kelompok Marxis. Konflik ini terjadi karena kelompok Marxis yang ikut dalam meruntuhkan rezim Syah tidak diikutsertakan dalam pemerintahan, 3) konflik kaum Mullah dengan kaum Mullah, yaitu antar pendukung Ayatullah Khomeini yang tergabung dalam partai Republik Islam (PRI) dengan para pendukung Ayatullah Shariat Madari yang tergabung dalam partai Republik Rakyat Iran (PRRI) yang menolak lembaga Wilayatul Faqih, 4) konflik antara kaum Mullah dengan Suku Kurdi. Suku Kurdi juga turut andil dalam menjatuhkan Syah Iran, sehingga Kaum Kurdi mengajukan tuntutan berupa hak otonomi, penghapusan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan serta pembagian yang adil dari hasil tambang minyak ternyata ditolak oleh Khomeini, sehingga terjadilah kontak senjata antara keduanya (M. Riza Sihbudi, 1989 : 83-91).

Dalam mengamalkan hasil revolusi Islam Iran, maka dibentuklah pasukan pengawal Revolusi Islam Iran (Pasdaran) yang tugasnya membantu angkatan bersenjata Iran dalam memelihara perdamaian dan kemerdekaan negara, serta melawan musuh-musuh dari luar dan menjaga kepentingan kaum Mullah (M. Riza Sihbudi, 1989 : 68-69).

2.3 Hipotesis

Menurut Winarno Surakhmad, hipotesis adalah sebuah kesimpulan yang harus dibuktikan kebenarannya (1980 : 66). Sedangkan Moh. Nasir berpendapat bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu (1988 : 182).

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari suatu penelitian yang kebenarannya

masih perlu diuji melalui analisis terhadap data sejarah yang berhasil dikumpulkan oleh seorang peneliti.

Untuk itu penulis mengajukan hipotesis seperti tercantum dibawah ini.

Kondisi politik dalam negeri republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini pada tahun 1979-1989 adalah : kekuasaan tertinggi berada di tangan para imam dan bentuk pemerintahan Republik Islam, konflik intern antar partai politik : kaum Mullah dengan Nasionalis, kaum Mullah dengan suku Kurdi (sunni), kaum Mullah dengan Marxis, kaum Mullah dengan kaum Mullah. Dibentuknya pasukan pengawal Revolusi Islam Iran (PASDARAN) yang bertujuan menjaga perdamaian dan kemerdekaan negara.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Sebelum menentukan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari metode penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan kegiatan ilmiah maka metode artikan sebagai cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Fuad Hasan dan Koentodjaraningrat, 1993: 7). Menurut Moh. Ali dikatakan bahwa pengertian metode adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan, atau dengan kata lain suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (1986: 21). Pengertian penelitian menurut pendapat Sutrisno Hadi sama dengan arti *research* dalam bahasa Inggris, artinya yaitu suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (1991: 4).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menemukan, menganalisis, menafsirkan dan memecahkan masalah secara ilmiah.

Mohammad Nasir mengelompokkan metode penelitian menjadi lima macam, 1) metode penelitian sejarah, 2) metode penelitian deskriptif, 3) metode penelitian eksperimental, 4) metode *grounded research*, 5) metode penelitian tindakan (1985: 54).

Dari kelima macam metode penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Hal ini dikarenakan data-data atau fakta-fakta yang diperoleh serta langkah-langkah kerja yang dilakukan lebih mengarah pada jenis penelitian historik. Adapun langkah kerja dan pengertian metode penelitian sejarah akan diuraikan seperti dibawah ini.



3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Louis Gottschalk menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian sejarah suatu proses menguji dan mengalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (1975: 32). Sedangkan menurut Moh. Nasir, metode penelitian sejarah adalah penyelidikan yang kritis dan hati-hati terhadap keadaan dan pengalaman masa lampau dengan menimbang secara teliti keterangan yang diperoleh sekaligus diinterpretasikan (1966: 32). Nugroho Notosusanto, mengartikan metode sejarah sebagai prosedur sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau itu (1971: 17).

Berdasar pendapat diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian sejarah adalah cara yang digunakan oleh sejarawan dalam bentuk prinsip dan aturan mengenai prosedur kerja untuk menuliskan kisah masa lampau melalui rekonstruksi imajinatif berdasarkan bahan-bahan atau jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan oleh masa lampau itu. Berkaitan dengan hal itu, Nugroho Notosusanto merumuskan langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah, yaitu 1) heuristik, yakni kegiatan yang menghimpun jejak masa lampau, 2) kritik, yakni menyelidiki kesejatian jejak baik bentuk maupun isinya, 3) interpretasi, yakni menetapkan makna dan saling kait antara fakta yang telah dihimpun, 4) penyajian, yakni menyampaikan dalam suatu kisah (1971: 17).

3.2.1 Heuristik

Kegiatan awal dalam penelitian sejarah adalah pengumpulan sumber-sumber atau bahan-bahan serta jejak-jejak masa lampau yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Aktivitas mengumpulkan sumber-sumber atau jejak-jejak sejarah ini disebut heuristik. Pengertian ini diperkuat oleh pendapat Nugroho Notosusanto yang menyatakan bahwa heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah (1978: 11).

Adapun sumber-sumber sejarah yang berupa jejak-jejak masa lampau yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber sejarah tertulis berupa buku-buku, majalah-majalah ataupun surat kabar. Hal inilah yang menjadikan penelitian itu disebut dengan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan berupa pendapat-pendapat para ahli mengenai suatu fakta terkait yang terdapat dalam media cetak, seperti buku, majalah, dan surat kabar.

3.2.2 Kritik

Setelah berhasil mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya adalah mengkritik sumber-sumber yang ada, dalam arti menilai, menguji dan menyeleksi jejak-jejak sejarah tersebut untuk mendapat jejak yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan, benar-benar asli serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang akan disusun (I.G. Widja, 1988 : 21). Winarno Surakhmad mengartikan kritik adalah tahap memilah-memilah dan mengkaji sumber-sumber yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah sumber tersebut asli dan dapat dipercaya atau tidak (1980: 134). Hal ini juga diungkapkan oleh Nugroho Notosusanto yang mendefinisikan kritik sebagai kegiatan menyelidiki keaslian jejak-jejak sejarah, baik bentuk maupun isinya (1971: 17). Penyelidikan sumber-sumber atau jejak-jejak masa lampau tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan sumber-sumber yang valid dan relevan. Hal ini disebabkan karena sumber atau data yang telah diperoleh dalam kegiatan heuristik masih berupa bahan mentah yang harus disusun menjadi fakta sejarah (1971: 41).

Kritik sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah kritik yang ditujukan untuk mengalisis keaslian suatu sumber. Dalam penelitian ini kegiatan mengkritik secara ekstern dimulai dengan memilih sumber yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Kemudian dilihat keaslian dan keutuhan dari sumber yang akan dipakai dalam penelitian ini.

Kritik intern adalah kritik yang ditujukan untuk menganalisa kebenaran isi data, kritik intern merupakan kelanjutan dari kritik ekstern. Dengan kata lain kritik

intern bekerja setelah kritik ekstern selesai menentukan bahwa dokumen yang dihadapi memang dokumen yang dicari. Apakah data tersebut dapat dipercaya ataukah tidak (Mohammad Nazir, 1988 : 59). Seorang peneliti harus melakukan perbandingan dari berbagai sumber untuk mengetahui kebenaran isi data dari suatu sumber yang akan dipergunakan. Peneliti harus tahu benar identitas sumber yang digunakan, sehingga hasil perbandingan menjadi mantap dan tepat (Nugroho Notosusanto, 1971 : 21). Akhirnya pelaksanaan kritik yang tepat yang menghasilkan fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya.

3.2.3 Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran diperlukan karena berbagai fakta yang telah ditemukan dalam kegiatan kritik tersebut masih terlepas dan berdiri sendiri. Sedangkan dalam penelitian ini berbagai fakta yang lepas satu sama lain harus dihubungkan atau dirangkaikan sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal (Nugroho Notosusanto, 1971 : 23).

I Gede Widja juga mengatakan bahwa fakta sejarah yang diperoleh itu perlu dihubungkan dan dikaitkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga antara fakta yang satu dengan yang lain kelihatan sebagai rangkaian yang masuk akal. Maksudnya yaitu menunjukkan kesesuaian satu sama lainnya (1988 : 23).

Uraian diatas telah menunjukkan bahwa untuk menulis suatu kisah tidaklah cukup hanya dengan mengambil fakta-fakta sejarah yang ada begitu saja. Dalam kegiatan interpretasi ini berusaha untuk membentuk suatu jalinan fakta yang kronologis, rasional, faktual dan kausalitas guna penulisan suatu kisah sejarah yang benar.

3.2.4 Historiografi

Setelah kegiatan heuristik, kritik, interpretasi berhasil dilaksanakan, maka langkah terakhir adalah historiografi. Berdasarkan pendapat Louis Bottschalk, historiografi adalah kegiatan rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang telah diperoleh (1975 : 32). Sebagai langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah, maka historiografi adalah klimak dari penelitian sejarah. Historiografi yaitu

menuliskan sejarah hasil interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis menjadi suatu kisah yang selaras (Nugroho Notosusanto, 1971 : 24).

Dalam merangkaikan fakta-fakta agar menjadi kisah sejarah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Maksudnya adalah menguraikan secara logis dan kronologis dari peristiwa-peristiwa masa lampau yang dianggap benar. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, secara akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Mohamad Nazir, 1985 :6). Jadi untuk menulis sebuah kisah sejarah tidak hanya sekedar menajajarkan fakta-fakta, tetapi juga disertai uraian-uraian secara nalar, logis, obyektif mengenai pokok-pokok masalah.

3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Penelitian sejarah dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu : (1) penelitian sejarah komparatif, (2) penelitian yuridis atau legal, (3) penelitian biografis, (4) penelitian bibliografis (Moh. Nazir, 1985 :61). Sedangkan penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian bibliografis atau dapat juga disebut dengan penelitian kepustakaan (Hadari Nawawi, 1990 :82). Mohamad Nazir mengartikan penelitian bibliografis adalah suatu jenis penelitian sejarah yang menggunakan metode sejarah untuk mencari, menganalisa, membuat interpretasi serta generalisasi dari fakta yang merupakan pendapat dari para ahli (1988 :61). Tempat penelitian bibliografis ini lebih banyak diperpustakaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Louis Gootschalk yang menyatakan bahwa laboratorium yang lazim bagi sejarawan adalah perpustakaan (1975 : 46).

Dengan demikian penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk menentukan tempat penelitian. Artinya pemilihan tempat penelitian atas dasar pertimbangan yang dibuat

oleh peneliti sendiri. Pertimbangan yang diambil didasarkan pada ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya oleh penulis (Mohamad Nazir, 1988 : 85). Dengan demikian penentuan perpustakaan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa tempat tersebut menyediakan sumber-sumber yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Adapun lokasi perpustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perpustakaan pusat Universitas Jember.. Ruang lingkup Referensi Kelamas (Keluarga Mahasiswa Sejarah), FKIP Universitas Jember, serta buku koleksi pribadi sebagai sumber acuan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan proses pelaksanaan historiografi, maka tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data. Mengingat penelitian yang penulis lakukan adalah studi kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah metode dokumenter. Adapun metode dokumenter menurut Suharsini Arikunto adalah metode penelitian yang menggunakan sumber tertulis sebagai sumber datanya (1980:40).

Hadari Nawawi mengatakan bahwa metode dokumenter adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk pula buku-buku tentang pendapat, teori-teori, dalil-dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. (1991 : 133)

Sumber bahan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah berasal dari sumber informasi dokumenter yang bersifat sekunder, yaitu berfungsi sebagai sumber informasi dan data yang telah diseleksi, diterjemahkan dan dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya (Kertini -Kartono, 1991 : 73)

Meskipun sumber-sumber yang digunakan bersifat sekunder tetapi dalam pemakaiannya telah diseleksi sehingga kebenarannya tidak kalah dengan sumber primer. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menghimpun sumber berupa buku-buku yang terdapat di perpustakaan dan laboratorium yang

telah disebutkan di depan maupun buku-buku yang menjadi koleksi penulis.

Selain itu dalam penelitian ini sumber yang terkumpul dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber pokok dan sumber penunjang. Sumber pokok adalah sumber yang dipakai sebagai acuan utama dalam memecahkan masalah yang dibahas. Sedangkan sumber penunjang adalah sumber tambahan yang menunjang sumber pokok.

3.5 Metode Analisis Data

Menganalisis data dalam suatu penelitian, khususnya penelitian sejarah selalu berkaitan dengan kegiatan kritik, interpretasi dan historiografi. Proses analisa semacam ini dalam penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan generalisasi atau kesimpulan yang akurat. Sedangkan dalam analisa data historis dalam penelitian ini akan digunakan metode filosofis dengan teknik logika induktif dan logika komparatif. Hadari Mawawi mengatakan bahwa menganalisa data historis menggunakan metode filosofis, karena metode ini bekerja dengan menggunakan data kualitatif. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa metode filosofis adalah prosedur untuk memecahkan masalah secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar dalam bentuk analisa yang sistematis berdasarkan pola pikir induktif atau logika (1990 :62).

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud metode filosofis dalam penelitian ini adalah cara atau teknik yang dipergunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang diteliti secara rasional melalui pemikiran yang terarah menurut aturan penalaran yang tepat untuk mencapai suatu kebenaran. Untuk itu hukum berpikir atau logika yang dipergunakan dalam analisis ini adalah teknik logika induktif dan logika komparatif.

3.5.1 Teknik Logika Induktif

Cara berpikir induktif oleh Sutroeno Hadi didefinisikan sebagai pola berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus untuk kemudian ditarik menjadi generalisasi yang bersifat umum (1990 : 18). Menurut Hadsri Nawawi yang dimaksud teknik logika induktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum (1990:18).

Berkaitan dengan pengertian diatas, teknik logika induktif yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini dilaksanakan berkaitan dengan kritik dan interpretasi. Maksudnya setiap melakukan analisa terhadap sumber data akan dibandingkan dengan sumber data lain. Tujuannya agar memperoleh data atau fakta serta kesimpulan yang benar.

3.5.2 Teknik Logika Komparatif

Teknik komparatif adalah suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara membanding-bandingkan data yang ada. Menurut Hohamad Ali, komparatif adalah teknik membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor atau situasi yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tersebut (1965 :123). Sedangkan menurut Winarno Surekhsed teknik logika komparatif adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu fenomena sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan (1982 : 143). Jadi metode komparatif adalah suatu cara untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya suatu peristiwa tertentu dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai fenomena, informasi atau data yang timbul.

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode filosofis dengan teknik logika induktif dan logika komparatif dalam penelitian ini adalah suatu cara atau teknik memecahkan suatu permasalahan secara rasional menurut aturan penalaran

yang tepat dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai fenomena atau data yang timbul untuk kemudian ditarik menjadi generalisasi yang bersifat umum demi tercapainya suatu kebenaran.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam bab I, tinjauan kepustakaan dan hipotesis yang diajukan dalam bab II serta pembahasan di bab IV, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi politik dalam negeri Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini tahun 1979-1989 adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan para imam dan bentuk pemerintahan Republik Islam, konflik intern antar partai politik : kaum Mullah dengan Nasionalis, kaum Mullah dengan suku Kurdi (sunni), kaum Mullah dengan Marxis, kaum Mullah dengan kaum Mullah. Dibentuknya pasukan pengawal Revolusi Islam Iran (PASDARAN) yang bertujuan menjaga perdamaian dan kemerdekaan negara.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dan pengalaman penulis selama masa penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

Bagi mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya selalu berusaha untuk bersikap obyektif dalam menyampaikan hasil-hasil penelitian sejarah. Pemahaman secara multidimensional mutlak diperlukan, sebab peristiwa sejarah yang bagaimanapun bentuknya mempunyai kaitan yang integral antara satu dengan lainnya;

Bagi para penentu kebijaksanaan dan masyarakat umum, hendaknya selalu menyadari akan pentingnya membudayakan sikap demokratis dalam penentuan setiap kebijaksanaan, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Disamping itu hendaknya selalu diupayakan usaha-usaha yang mengarah pada perbaikan keadaan sosial budaya dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat;

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan acuan untuk mengadakan penelitian sejenis

guna lebih mengembangkan dan menyempurnakan kesimpulan-kesimpulan yang telah dihasilkan.

Bagi almamater, hendaknya terus melakukan peningkatan terhadap pelayanan, sarana dan prasarana, serta memperbanyak literatur-literatur sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian sejarah sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.



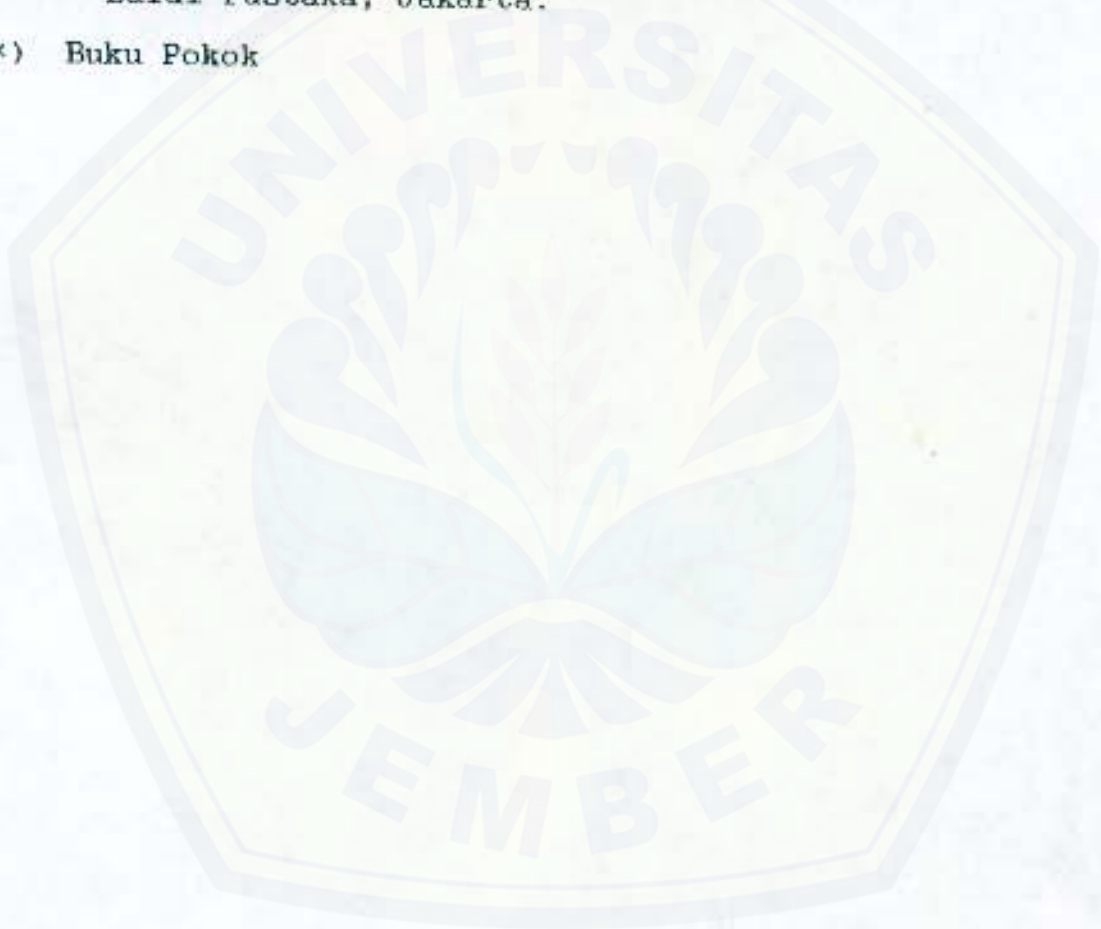
DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Aceh, 1980, Syi'ah Rasionalisme Dalam Islam, Ramdhani, Semarang
- Abboushi, WF. 1981, "Politik di Iran", dalam Mochtar Mas'ud dan Colin Mas Andrew (ed), Perbandingan Sistem Politik, UGM Press, Yogyakarta
- Ahmad Al Maossawi, 1986, Tema Wilayah Faqih Dalam Tahap-tahap Awal Berdirinya Aliran Syi'ah dan Kedudukan Marja'i Taqlid, Masalah-masalah Teori Politik Islam, Mizan, Bandung.
- Al Musawi, Musa, 1988, Tragedi Revolusi Islam Iran, Terjemahan H.A Syakur Yasin, Al Ma'arif, Bandung. *)
- Ali Syari'ati, 1993, Islam Agama "Protes" Terjemahan Satrio Pinandito, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Anonim, 1984, Jum'at Hitam; Saat Nasib Revolusi Ditentukan, Yaum Al Quds, Jakarta, No. 136
- Anonim, 1989, 10 Tahun Revolusi Khomeini, Jakarta-jakarta, Jakarta, No. 136
- Anonim, 1991, Kebijakan Luar Negeri Republik Islam Iran, Yaum Al Quds, Jakarta, No. 28
- Depdikbud, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Donohue, John J. dan Esposito, John L. (Eds.), 1989, Islam dan Tantangan pembaharuan : Ensiklopedi Masalah-masalah, Terjemahan Machnun Husein, Rajawali Press, Jakarta.
- Eissenstaat, SN, tth, Revolusi dan Transformasi Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta.
- Ezzati, A, 1990, Gerakan Islam Sebuah Analisis, terjemahan Agung Sulistiyadi, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, 1981, Beberapa Asas Metodologi Ilmiah, dalam Koentjaraningrat (ed): Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- Garaudy, Roger, 1993, Islam Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya, Terjemahan Afif Muhammad, Pustaka, Bandung.
- Gottschalk, Louis, 1975, Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1990, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press, Yogyakarta.
- Hasan Syadily, 1982, Ensiklopedi Indonesia: Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- I.G. Widja, 1988, Pengantar Ilmu Sejarah : Sejarah dalam Perspektif Pendidikan, Satya Wacana, Semarang.

- Kartini Kartono, 1980, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Jakarta.
- Kalim Siddiqui, Hamid Algar, dkk, 1984, Gerbang Kebangkitan revolusi Islam dan Khomaini dalam Perbincangan, terjemahan Ae Suyono dkk, Salahuddin Press, Yogyakarta. *)
- Kedutaan Besar republik Islam Iran, tth, UUD Republik Islam Iran, Humas Kedubes Republik Islam Iran, Jakarta. *)
- _____, tth, Republik Islam Iran Selayang Pandang, Humas Kedubes Republik Islam Iran, Jakarta. *)
- Mahmud Junus, 1990, Terjemahan Al Qur'an Al Karim, Al Ma'arif, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 1988, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mohammad Ali, 1985, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Angkasa, Bandung.
- Moh. Mazir, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Riza Sih Budi, 1988, Konflik Intern Di Iran Pasca revolusi, Dalam Analisa No. 3 CSIS, Jakarta.
- _____, 1989, Dinamika Revolusi Islam Iran, Pustaka Hidayah, Jakarta. *)
- _____, 1992, Eksistensi Palestina Di Mata Teheran dan Wasington, Mizan, Bandung.
- _____, 1992, Politik Parlemen dan Oposisi di Iran Pasca revolusi, Dalam Jurnal Ilmu Politik 11, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1993, M. Hamdan Basyar, Happy Boen Zulkarnaen, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, Bresco, Bandung.
- M. Amin Rais, "Arah Perkembangan Timur Tengah", Jurnal Ilmu Politik, Jakarta. No. 12.
- Mardalis, 1989, Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta.
- Mochtar Mas'ood, 1990, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, LP3S, Jakarta.
- Muntaz Ahmad (ed), 1986, Masalah-masalah Teori Politik Islam, Mizan, Bandung.
- Muslih Tathoni, 1994, Paham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nazir Tamara, 1980, Revolusi Islam, Sinar Kasih, Jakarta. *)
- Nugroho Notosusanto, 1971, Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah, Pusat Sejarah ABRI, Dephankam, Jakarta.

- Sahilun A. Nasir, 1982, Firgoth Syi'ah, Al Ikhlas, Surabaya.
- Suharsimi Arikunto, 1987, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Bandung.
- Sutrieno Hadi, 1986, Metodologi Research I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Thabathaba'i dan Allamah M.H., 1993, Islam Syi'ah Asal Usul dan Perkembangannya, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Taylor R. Alan 1990, Pergeseran-pergeseran Aliansi Dalam Sistem Perimbangannya Kekuatan Arab, Amar press, Surabaya.
- Winarno Surakhmad, 1980, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung.
- W.J.S., Poerwadarminta, 1987, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

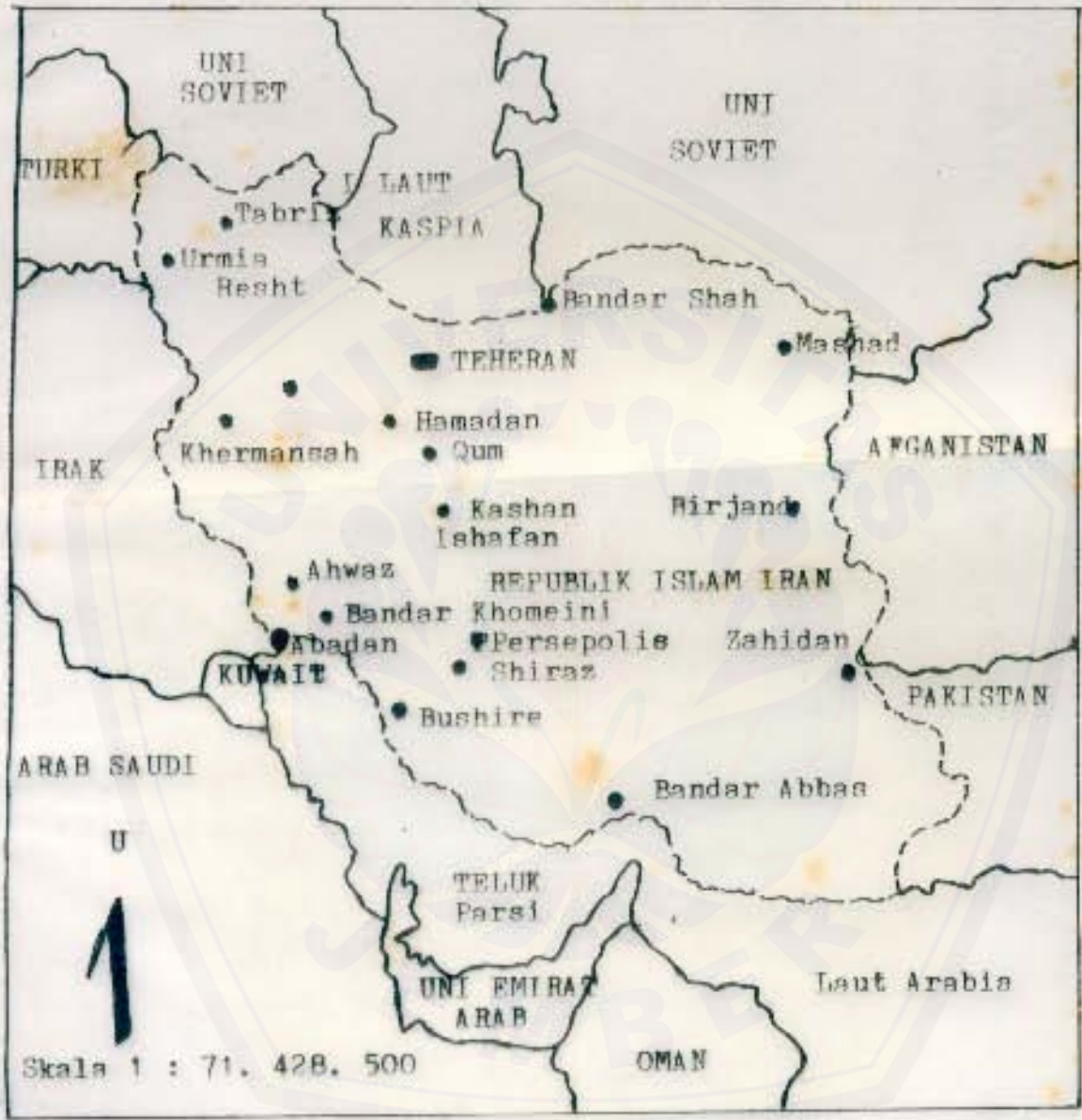
*) Buku Pokok



Matrik Penelitian

TOPIK	JUDUL	SIFAT DAN JENIS PENELITIAN	PERMASALAHAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS
SEJARAH ASIA BARAT DAYA	KONDISI POLITIK DALAM NEGERI REPUBLIK ISLAM IRAN PADA MASA AYATULLAH KHOMAYNI TAHUN 1979-1989	SIFAT PENELITIAN : Studi Kepustakaan JENIS PENELITIAN : Historik	Bagaimanaakah kondisi politik dalam negeri Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini tahun 1979-1989	Buku Pukok : 6 Buah Buku Penun- jang : 39 buah, Maja- lah	1. Penentuan tempat penelitian : Proposive sam- pling 2. Pengumpulan data : Dokumenter 3. Analisis data : Metode filosofik dengan teknik logika kompara- tif dan teknik logika induktif.	Kondisi politik dalam negeri Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Khomeini tahun 1979 - 1989 : kekuasaan tertinggi berada ditangan para imam, dan ben- tuk pemerintahan Republik Islam, konflik intern antar partai politik : kaum Mullah dengan Nasionalis, kaum Mullah dengan Suku Kurdi (Suni), kaum Mullah dengan Marxis, kaum Mullah dengan kaum Mullah. Dibentuknya Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran (PASDARAN) yang bertujuan memelihara pier- maian dan kemerdekaan negara.

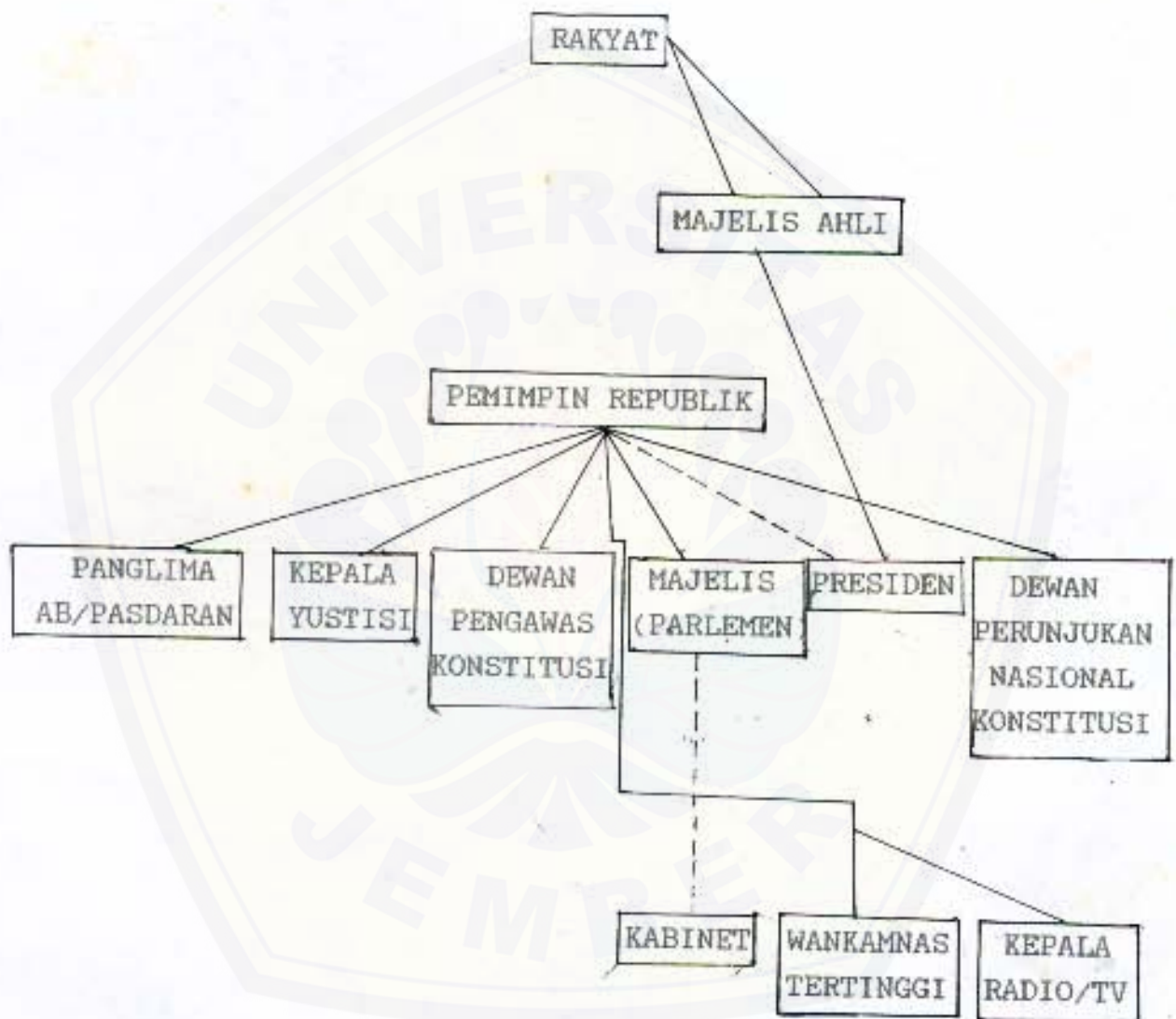
PETA NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN



Sumber : Grollier International Inc, 1990 : 61

Lampiran 3

STRUKTUR KEKUASAAN REPUBLIK ISLAM IRAN



CATATAN :

—————: Memilih Langsung

-----: Menyetujui Langsung

SUMBER :

Laporan Tahunan Kedutaan

Besar Ri-Teheran 1990-1991

Lampiran 4

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
UPT PERPUSTAKAAN

Surat Keterangan Studi Literatur
Nomor : 224/PT 32 H.6./B.1.97

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Kuddinatun
NIM : 9202105012
Mahasiswa : Program Pendidikan Sejarah, FKIP
Universitas Jember
Angkatan : 1992

Terhitung mulai bulan September 1996 sampai Juli 1997 telah mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal	Tempat			
	R.Sirkulasi	R.Referensi	R.OR	R.Skripsi
30 Sept. 1996	-	-	X	-
4 Okt. 1996	X	-	-	-
15 Nov. 1996	-	X	X	-
27 Des. 1996	-	-	X	-
29 Jan. 1997	-	X	X	X
19 Mart. 1997	X	-	-	X
17 Apr. 1997	-	X	-	X
9 Mei 1997	X	X	-	X
2 Juni 1997	-	X	-	-
1 Juli 1997	X	-	X	X
22 Juli 1997	-	-	-	X

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, Agustus 1997

A.n.Kepala

Kasubag. TU Perpustakaan



Mrs. Budiwati, S.Sos

NIP 130 683 181

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

N a m a : Khandikhatun.....
Nim / Jurusan / Angkatan : 920.240.5012.....
Judul Skripsi : KONDISI EKOWISATA REPUBLIK INDONESIA PADA
 NASA AKATULLAH KHOMAMILY TAHUN 1979-1989 ..

Pembimbing I : Drs. Iman Muchtar S.H.....
Pembimbing II : Drs. Subjetro.....
KEGIATAN KONSULTASI :

No.	Hari tanggal	Materi Konsultasi	Tt. Pembimbing I
1.	SENIN, 20 JANUARI 1997	JUDUL	
2.	SENIN,	MATRIK PENELITIAN	
3.	SENIN, 7 APRIL 1997	JUDUL, MATRIK PENELITIAN	
4.	SENIN, 20 APRIL 1997	PAB I	
5.	SENIN, 27-5-1997	PAB II	
6.	SENIN, 9-6-1997	PAB III	
7.	JUMAT, 19-7-1997	PAB IV	
8.	SENIN, 28-7-1997	PAB V	
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

GATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan UJIAN
 S K R I P S I .-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KECERDASAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

N a m a : KUSDJALATUN.....
 Nim / Jurusan / Angkatan : 9202105012/pend.IIS/1992.....
 Judul Skripsi : KODIAL BELITAK DALAM NEGARA RI PADA.....
 KASA. AKATULAH KINOMBIL TABUK 1979-1989.....

 Pembimbing I : Dra. Irma Nurbaiti.....
 Pembimbing II : Dra. Sujitro.....
 KEGIATAN KONSULTASI :

No.	Hari tanggal	Materi Konsultasi	Pt. Pembimbing I
1.	KAMIS, 23-1-1997	JUDUL SKRIPSI	
2.	RABU, 29-1-1997	MATRIK PENELITIAN	
3.	KAMIS, 6-2-1997	MATRIB, PAR I	
4.	RABU, 12-2-1997	PAR I	
5.	Rabu, 20-2-1997	PAR II	
6.	KAMIS, 27-3-1997	PAR I, II	
7.	SELASA, 15-4-1997	PAR III	
8.	MEL, 17-5-1997	PAR IV	
9.	JUNI, 18-6-1997	PAR V	
10.	JULI, 15-7-1997	PAR IV, V	
11.
12.
13.
14.
15.

CATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan UJIAN
 S K R I P S I.-